

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi pada Bendahara SKPD Se-Kabupaten Buol)

Nuraini¹, Muslimin dan Abdul Kahar²

inalriniecha@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The study aims to describe: 1) simultaneous influence of internal control and adherence to accounting rules on the tendency of accounting fraud on treasurers in governmental working units in Buol District; 2) significant influence of internal control, partially on the tendency of accounting fraud on treasurers in governmental working units in Buol District; 3). significant influence of adherence to accounting rules on the tendency of accounting fraud, partially on treasurers in governmental working units in Buol District. Statistical results using multiple linear regressions analysis with SPSS 16.0 finda that : 1) internal control and adherence to accounting rules have simultaneous influence on the tendency of accounting fraud on treasurers in governmental working units in Buol District; 2) internal control partially has positive and significant influence on the tendency of accounting fraud on treasurers in governmental working units in Buol District; 3) adherence to accounting rules partially has positive and significant influence on the tendency of accounting fraud on treasurers in governmental working units in Buol District.

Keywords: *internal control, adherence to accounting rules, the tendency of accounting fraud*

Berdasarkan Undang-undang 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Halim 2012:24).

Manajemen keuangan daerah pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua hal tersebut sangat menentukan

kedudukan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Otonomi Daerah yang sedang dan terus bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014). Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari adanya undang-undang tersebut adalah perlu diatur pula tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai perwujudan dalam mengakomodasi hal tersebut, diterbitkan pula Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pembaharuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999). Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan bagian

utama dalam reformasi di bidang keuangan daerah. Dengan demikian, terbit dan pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan momentum penting dalam proses reformasi keuangan daerah dimaksud.

Kabupaten Buol adalah salah satu daerah otonomi, dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) berdasarkan konsep nilai uang (*value for money*), maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Dalam kinerja yang dimaksud bukan hanya menyangkut kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para pengelola keuangan, namun sikap, etika dan moral yang dimiliki oleh setiap individu turut menentukan output yang dihasilkan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol nomor 05 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Masih terdapatnya temuan-temuan dalam laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya di lingkungan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan yang ada.

Undang-undang no 1 tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan

yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga atau barang-barang milik negara/daerah. Sedangkan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa bendahara penerima/pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggungjawab kepada kuasa bendahara umum negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi baik secara simultan maupun parsial (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian verifikatif atau penelitian kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol.

Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bendahara SKPD yang ada di Kabupaten Buol sebanyak 76 orang. Metode *sampling jenuh* digunakan dalam penelitian ini dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linier berganda untuk dua variabel independen yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

- Y = Kecenderungan kecurangan akuntansi
- a = nilai Y ketika X = 0
- b₁ = angka koefisien regresi pengendalian internal
- b₂ = angka koefisien regresi ketaatan aturan akuntansi
- X₁ = Pengendalian internal
- X₂ = Ketaatan aturan akuntansi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas (kesahihan) terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini maka diketahui nilai kesahihan dari 13 pertanyaan variabel pengendalian internal (X1), 11 pertanyaan ketaatan aturan akuntansi (X2), dan 6 pertanyaan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) maka dapat dinyatakan layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini, karena nilai r hitung yang diperoleh r kritis > 0,3.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh indikator variabel pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan memenuhi syarat reliabel, karena nilai koefisien Cronbach's Alpha seluruh instrumen variabel independen dan dependen lebih besar dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa nilai sebaran data penelitian terlekat di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dinyatakan data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk metode analisis selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

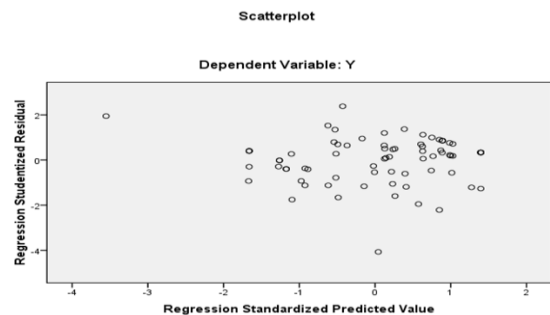
Model	Correlations			Correlations Statistic	
	Zero-Order	Partial	Part	Tolerance	VIF
Constanta					
Pengendalian Internal (X1)	.671	.352	.262	.452	2.210
Ketaatan Aturan Akuntansi (X2)	.669	.346	.256	.452	2.210

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 1 di atas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10, dan nilai variance inflation (VIF) yang lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas terhadap variabel independen adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 di atas memperlihatkan bahwa nilai sebaran data penelitian tersebar

secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, model regresi layak untuk digunakan.

Hasil Analisis Data

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependen Variabel Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	.289	.364	.794	.430
X1 = Pengendalian Internal	.389	.152	3.214	.002
X2 = Ketaatan Aturan Akuntansi	.381	.149	3.150	.002
R	= .719			
R - Square	= .516		F-Statistik = 38.953	
Adjusted R-Square	= .503		Sig.F = .000	

Sumber : Data primer yang diolah

Mengacu pada tabel 2 di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,289 + 0,389X_1 + 0,381X_2$$

Persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa kedua variabel pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (uji F)

Hasil uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 38.953 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini berarti secara simultan seluruh variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan

Akuntansi (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol) dapat diterima.

2. Uji Partial (uji t)

a. Variabel pengendalian internal

Nilai t_{hitung} pengendalian internal sebesar 3,214 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < \text{nilai } \alpha < 0,05$ memberikan arti bahwa secara partial pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis kedua Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol) dengan demikian dapat diterima.

b. Variabel ketaatan aturan akuntansi

Nilai t_{hitung} ketaatan aturan akuntansi sebesar 3,150 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < \text{nilai } \alpha < 0,05$ memberikan arti bahwa secara partial ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis ketiga Ketaatan Aturan Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol) dengan demikian dapat diterima.

3. Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,503 menunjukkan kemampuan variabel pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi (variabel dependen) secara simultan adalah sebesar 50,3%, sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan insentif.

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,719 menunjukkan korelasi atau tingkat keeratan hubungan antara pengendalian

internal (X_1) dan ketaatan aturan akuntansi (X_2) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 71,9%. Nilai koefisien korelasi yang mendekati 1 mempunyai makna model regresi yang diperoleh sangat kuat.

1. Pengaruh Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol

Hasil uji secara statistik menyatakan bahwa secara simultan variabel pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol.

Pengendalian internal (meliputi: struktur organisasi, analisis resiko, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, keakuratan, tindak lanjut atas temuan audit dan verifikasi internal), ketaatan aturan akuntansi (meliputi: persyaratan pengungkapan, kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian) yang dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku maka dapat menekankan asumsi-asumsi penyimpangan perilaku yang dapat digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini mendukung *theory Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sebagai proses yang didesain untuk menghasilkan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan dalam kategori : Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan dalam laporan keuangan dan

Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal ditinjau dari lima komponen, dimana dari kelima komponen ini antara lain terdiri atas struktur organisasi, Analisis resiko, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Keakuratan, Tindak lanjut atas temuan audit dan Verifikasi internal.

Besarnya pengaruh Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, ditunjukkan bahwa pengendalian internal sangat penting diterapkan kepada bendahara SKPD se Kabupaten Buol, penerapan pengendalian internal yang efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan administrasi keuangan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan informasi yang handal guna kepentingan penyusunan laporan keuangan.

Ketaatan aturan akuntansi juga wajib dilakukan guna mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini dikarenakan bahwa manfaat dari ketaatan aturan akuntansi adalah bahwa dalam melakukan setiap proses pengelolaan administrasi keuangan yang dikerjakan oleh bendahara, bendahara tersebut selalu berdasarkan pada prinsip dan standar akuntansi yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah bendahara dalam melakukan tugasnya yang akan menunjang terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Bastian,2006). Secara teoritis,

ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor. Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika PTN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian, dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (Thoyibatun, 2009).

Peran bendahara SKPD terkait dengan tingkat pemahaman penatausahaan keuangan daerah dan proses implementasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan cara yang baik akan membantu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi serta dapat membantu terciptanya suatu penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas oleh SKPD se Kabupaten Buol.

Fakta di atas didukung prinsip – prinsip akuntansi yang termuat dalam etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimana penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia meliputi : Tanggung jawab penerapan, Kepentingan publik, Integritas, Obyektifitas, Kehati-hatian, Kerahasiaan, Konsistensi, dan Standar teknis.

Fakta di atas didukung oleh teori segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R.Cressey yaitu :

a. Tekanan yang diterima (*Perceived Pressure*)

Konsep ini berarti orang (pelaku fraud) mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Masalah keuangan tersebut timbul dari situasi : pelanggaran terhadap kewajiban yang terkait jabatannya, kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan pribadi, kondisi bisnis yang memburuk, keterpurukan/kesendirian, mendapatkan status, hubungan pegawai dengan atasan.

b. Peluang yang dilihat (*Perceived Opportunity*)

Untuk mewujudkan *fraud*, pelaku biasanya melihat peluang. Terdapat dua komponen dalam persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information* yang merupakan suatu pengetahuan bahwa jabatan yang diemban dengan segala atribut kewenangan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi atau dengan konsekuensi yang masih dapat ditolerir dan dimanage. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pengalamannya atau orang lain. Kedua, *technical skill* atau keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud* tersebut. Biasanya keahlian tersebut adalah keahlian yang mengakibatkan orang tersebut memperoleh jabatannya.

c. Pembeneran (*Rationalization*)

Selain adanya tekanan dan peluang, hal lain yang akan menyempurnakan motif menjadi perbuatan adalah pembeneran. Pembeneran terhadap rencana *fraud* sebelum *fraud* tersebut dilakukan.

Penelitian ini juga didukung oleh teori segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) yang dikemukakan oleh Donald R.Cressey yaitu Tekanan yang diterima (*Perceived Pressure*), Peluang yang dilihat (*Perceived Opportunity*), Pembeneran (*Rationalization*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar bendahara–bendahara SKPD yang ada di Kabupaten Buol telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta mengetahui akan tanggung jawab besar yang diembannya, masih ada sebagian kecil bendahara yang dalam melaksanakan pekerjaannya melakukan pembeneran-pembeneran. Hal ini dilakukan karena situasi yang mendesak serta kondisi keuangan instansi yang tidak stabil.

Hal ini juga semakin dipertegas dalam teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne dimana terdapat empat faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposure*

(Pengungkapan). Faktor greed dan need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generic/umum).

a. Faktor Individu

1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).
2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/ organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

b. Faktor Generic

1. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
2. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol). Adanya pengaruh tersebut karena pengendalian internal struktur organisasi SKPD menjadi lebih baik dan jelas, dimana struktur organisasi setiap SKPD di Kabupaten Buol sebagian besar telah menyesuaikan dengan sifat kegiatan serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Pengendalian internal juga telah diterapkan oleh pimpinan SKPD kepada semua pegawainya, dimana pimpinan SKPD selalu melakukan pengecekan terhadap tugas dan pekerjaan pegawainya (bendahara) serta laporan administrasi keuangan yang dilaporkan oleh bendaharanya kemudian pimpinan SKPD tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pegawainya yang melakukan tindakan menyimpang.

Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.13 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Apabila pelaksanaan system pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik dan berkualitas maka keandalan laporan keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa pengertian sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Lia Meliany, Erna Hernawati (2013) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan bahwa fungsi-fungsi pengendalian intern telah berjalan seperti yang diharapkan. Untuk itu, pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan semua aspek atau unsur-unsur yang termuat dalam sistem pengendalian internal pemerintah sehingga secara parsial Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Sebaik apapun aturan dan prosedur disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang dapat dipercaya dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam meminimalisir terjadinya kecurangan adalah dengan meningkatkan pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh semua SKPD kepada semua pegawai khususnya bendahara SKPD. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap bendahara SKPD se Kabupaten Buol sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan (*Fraud*) dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Hal ini juga tidak terlepas dari sikap kepemimpinan setiap SKPD yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan sekaligus pengguna anggaran.

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2012) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas organisasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel intervening yang berarti dengan meningkatnya keefektifan pengendalian

internal yang disertai dengan kecenderungan kecurangan akuntansi yang menurun akan menghasilkan akuntabilitas organisasi yang semakin baik. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol

Hasil uji parsial membuktikan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi pada Bendahara SKPD se-Kabupaten Buol). Teori perkembangan moral Kohlberg (1969) dalam Adelin, Vani (2013) yang menyatakan bahwa "*Moralitas manajemen yang tinggi juga di dukung dengan ketaatan aturan yang berlaku*". Dalam teori ini, bendahara sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan dalam suatu SKPD selalu berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen maupun individu yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, diharapkan setiap Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangannya secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah diterima secara umum.

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara secara baik dan

maksimal akan menghasilkan suatu LPJ bendahara yang merupakan bagian dari laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Adanya proses administrasi yang baik serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu akan sangat mendukung dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara – bendahara yang ada di setiap SKPD Kabupaten Buol menyadari dengan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini terbukti dengan adanya sikap bendahara yang secara tegas, berani, dan tanpa tekanan bersedia mengungkapkan seluruh kejadian organisasi yang sebenarnya jika memang diperlukan serta selalu bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatannya setiap realisasi keuangan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung atau dokumen yang lengkap serta pencatatan setiap transaksi dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini akan membantu penyusun laporan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal, serta akurat informasinya.

Adanya aturan akuntansi tersebut, menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan instansi. Apabila pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan peraturan atau standar akuntansi yang berlaku, maka kondisi ini akan memungkinkan seorang bendahara melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan instansi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani (2014) yang menyatakan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif pada akuntabilitas organisasi melalui Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Ketaatan aturan akuntansi oleh bendahara akan berdampak terhadap aktivitas operasional keuangan yang dilakukan oleh suatu SKPD, proses administrasi keuangan yang teratur dan sesuai dengan program dan perencanaan kegiatan suatu SKPD serta laporan-laporan yang termuat dalam pembukuan secara rinci dan jelas menggambarkan kondisi keuangan SKPD sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi tidak terjadi.

Keterbatasan Penelitian:

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan bendahara sebagai responden sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan.
2. penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan metode wawancara. Wawancara perlu dilakukan untuk memperoleh tanggapan responden secara lebih mendalam atas variabel penelitian. Penulis tidak melakukan wawancara dikarenakan keterbatasan akses untuk menjangkau semua wilayah penelitian.
3. Beberapa item pernyataan dalam Kuisisioner penelitian ini seperti variabel Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi belum sepenuhnya di eksplorasi.
4. Dalam penelitian ini, indikator yang terdapat dalam dimensi variabel Pengendalian Internal belum tereksplor secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi secara simultan dapat

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se Kabupaten Buol.

2. Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se Kabupaten Buol.
3. Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Bendahara SKPD se Kabupaten Buol.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap SKPD sebaiknya lebih memperhatikan pengendalian atas sistem informasi khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih terinci, jelas, dan mudah.
2. Setiap Kepala SKPD hendaknya lebih bersikap proaktif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara agar kesalahan maupun kekeliruan dalam proses administrasi keuangan dapat diketahui sebelum adanya pemeriksaan baik Inspektorat maupun BPK.
3. Bendahara maupun pengelola keuangan yang ada di setiap SKPD hendaknya dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara benar sehingga dapat membantu terciptanya laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berani bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya dan tidak merasa berada dibawah tekanan siapapun juga.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menentukan sampel dengan kriteria pendidikan terakhir. Staff atau Bendahara dengan pendidikan terakhir yang lebih tinggi serta disiplin ilmu yang dimiliki diharapkan lebih mampu memahami

tugas pokok dan fungsi sebagai seorang bendahara.

5. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengeksplorasi keseluruhan indikator yang ada dalam dimensi variabel pengendalian internal.
6. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol agar lebih menekankan perhatian pada variabel – variabel yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Kepala Daerah melalui lembaga auditor internalnya (*Inspektorat*) dapat mengidentifikasi gejala, tanda – tanda, dan peluang terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di lingkungan pengelolaan keuangan daerah serta melakukan *fraud risk assessment* secara berkala sehingga tindakan kecurangan dapat dieliminasi.
7. Pimpinan SKPD hendaknya melaksanakan pengawasan melekat yang dilakukan dengan cara yang tegas, tanpa adanya rasa canggung akibat faktor psikologis bawahan dan atasan yang selama ini terjalin hubungan baik. Namun, dalam penegakan etika, seorang pemimpin harus peduli dan berani memberikan hukuman kepada bawahan yang melakukan kesalahan.
8. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian seorang bendahara dalam pengelolaan keuangan melalui kegiatan – kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan maupun sosialisasi – sosialisasi keuangan.
9. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor – faktor lain yang benar – benar berpengaruh terhadap pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian artikel ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan bimbingan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Muslimin, SE., M.M dan Dr. Abdul Kahar selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kesempurnaan penulisan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelin, Vani. 2013. *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan : ejournal.unp.ac.id.
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*
- Comitee of sponsoring organizations of the treadway commission, 2013. *Internal control– integrated framework*.
- Farianti, Riski. 2016. *Teori – teori Fraud*. riskifarianti.blogspot.com/2016/11/22.
- Halim, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik*. SA Seksi 240. Tanggungjawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013, *Kabupaten Buol*.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014, *Kabupaten Buol*.
- Meliany, Lia & Hernawati, Erna. 2013. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi* Jurnal UPN “Veteran” Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pradnyani, Ni Luh Putu Normadewi Abdi. 2014. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi Dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Negeri di Propinsi Bali)*. Tesis. Denpasar : Universitas Udayana. www.pps.unud.ac.id/thesis/unud.
- Profil Daerah Kabupaten Buol. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buol.
- Wilopo, 2006. *Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*. Simposium